

## **BAB 4**

### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

#### **4.1 Sejarah PT. Pos Indonesia (Persero)**

Berdasarkan Pos Indonesia, sejarah mencatat keberadaan Pos Indonesia begitu panjang, Kantor Pos pertama didirikan di Batavia (sekarang Jakarta) oleh Gubernur Jenderal G.W Baron van Imhoff pada tanggal 26 Agustus 1746 dengan tujuan untuk lebih menjamin keamanan surat-surat penduduk, terutama bagi mereka yang berdagang di kantor-kantor di luar Jawa dan bagi mereka yang datang dari dan pergi ke Negeri Belanda. Sejak itulah pelayanan pos telah lahir mengemban peran dan fungsi pelayanan kepada publik. Setelah Kantor pos Batavia didirikan, maka empat tahun kemudian didirikan Kantor pos Semarang untuk mengadakan hubungan pos yang teratur antara kedua tempat itu dan untuk mempercepat pengirimannya. Rute perjalanan pos kala itu ialah melalui Karawang, Cirebon dan Pekalongan.

Pos Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan status mulai dari Jawatan PTT (*Post, Telegraph dan Telephone*). Badan usaha yang dipimpin oleh seorang Kepala Jawatan ini operasinya tidak bersifat komersial dan fungsinya lebih diarahkan untuk mengadakan pelayanan publik. Perkembangan terus terjadi hingga statusnya menjadi Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi (PN Postel). Mengamati perkembangan sektor pos dan telekomunikasi yang berkembang sangat pesat, maka pada tahun 1965 PN Postel diganti menjadi Perusahaan Negara Pos dan Giro (PN Pos dan Giro), dan pada tahun 1978 berubah menjadi Perum Pos dan Giro. Sejak saat ini Perum Pos dan Giro ditegaskan sebagai badan usaha tunggal dalam

menyelenggarakan dinas pos dan giro pos baik untuk hubungan dalam maupun luar negeri. Selama 17 tahun berstatus Perum, maka pada Juni 1995 berubah menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT Pos Indonesia (Persero).

Pos Indonesia kini telah mampu menunjukkan kreativitasnya dalam pengembangan bidang pos Indonesia dengan memanfaatkan infrastruktur jejaring yang dimilikinya yang mencapai sekitar 58.700 titik layanan yang menjangkau 100 persen kota/kabupaten, hampir 100 persen kecamatan dan 42 persen kelurahan/desa, dan 940 lokasi transmigrasi terpencil di Indonesia. Wilayah layanan tersebut terbagi dalam 11 Regional yaitu

1. Regional I Pusat Medan (meliputi Provinsi Aceh dan Sumatera Utara);
2. Regional II Pusat Padang (meliputi Provinsi Riau, Kepulauan Riau, dan Sumatera Barat);
3. Regional III Pusat Palembang (meliputi Provinsi Bengkulu, Jambi, Lampung, Sumatera Selatan, dan Kepulauan Bangka Belitung);
4. Regional IV Pusat Jakarta (meliputi provinsi D. K. I. Jakarta, Banten, dan sebagian Jawa Barat);
5. Regional V Pusat Bandung (meliputi sebagian Provinsi Jawa Barat);
6. Regional VI Pusat Semarang (meliputi Provinsi Jawa Tengah dan D. I. Yogyakarta);
7. Regional VII Pusat Surabaya (meliputi Provinsi Jawa Timur);
8. Regional VIII Pusat Denpasar (meliputi Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur);

9. Regional IX Pusat Banjarbaru (meliputi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara dan Kalimantan Selatan);
  10. Regional X Pusat Makassar (meliputi Provinsi Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku dan Maluku Utara);
  11. Regional XI Pusat Jayapura (meliputi Provinsi Papua Barat, dan Papua).
- (Pos Indonesia, 2019)

#### **4.2 Profil PT Pos Indonesia (Regional Area VI) Semarang**

Kantor Pos Indonesia (Regional Area VI) Semarang terletak di jalan Sisingamangaraja No.45 Semarang. Kantor Pos Indonesia (Regional Area VI) Semarang merupakan salah satu kantor pengawasan dan penentu kebijakan di bawah kantor pusat untuk wilayah provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kantor ini bertugas sebagai penentu kebijakan serta pengawasan seluruh 33 kantor pos pemeriksa serta 1 MPC (*mail processing center*) di seluruh Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu:

1. Banjarnegara (Ba) 53400
2. Blora (Bla) 58200
3. Brebes (Bb) 52200
4. Bantul (Bul) 55700
5. Boyolali (Bi) 57300
6. Cilacap (Cp) 53200
7. Jepara (Jpa) 59400
8. Karanganyar (Kay) 57700
9. Kebumen (Km) 54300
10. Kendal (Kl) 51300
11. Klaten (Kt) 57400

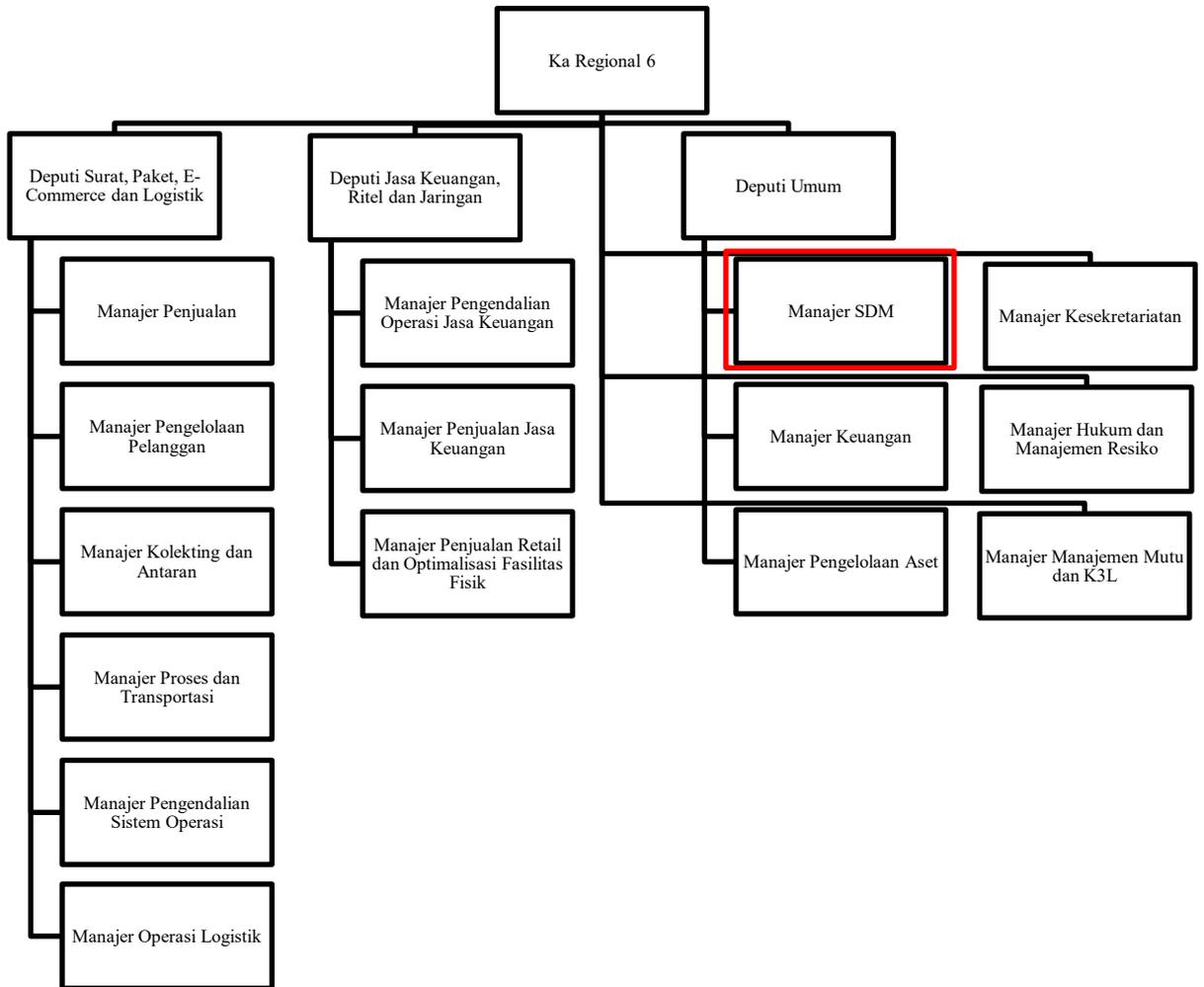
12. Kudus (Ks) 59300
13. Magelang (Mg) 56100
14. Pati (Pt) 59100
15. Pekalongan (Pk) 51100
16. Pemalang (Pml) 52300
17. Purbalingga (Pbg) 53300
18. Purwodadi (Pw) 58100
19. Purwokerto (Pwt) 53100
20. Purworejo (Pwr) 54100
21. Salatiga (Sa) 50700
22. Semarang (Sm) 50000
23. MPC Semarang (Sm) 50400
24. Solo (Slo) 57100
25. Sragen (Sr) 57200
26. Sukoharjo (Skh) 57500
27. Tegal (Tg) 52100
28. Temanggung (Tmg) 56200
29. Ungaran (Unr) 50500
30. Wonogiri (Wng) 57600
31. Wonosari (Wno) 55800
32. Wonosobo (Ws) 56300
33. Yogyakarta (Yk) 55000
34. Wates (Wt) 55600

*(kantorpos.posindonesia.co.id)*

### 4.3 Struktur Organisasi Struktur Organisasi Kantor Pos Regional

#### VI Semarang

Bagan 4.1 Struktur Organisasi Kantor Pos Regional VI Semarang



Pegawai PT Pos Indonesia untuk (Regional Area VI) Semarang berjumlah 26.000 pegawai aktif yang tersebar pada 33 kantor pemeriksa dan 1 MPC di area Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) (Pos Indonesia, 2019). Setiap pegawai memiliki arsip kepegawaian seperti surat keputusan, arsip pribadi, dan berbagai catatan kepegawaian. Pada Kantor regional area VI, divisi sumber daya manusia merupakan *records center* untuk seluruh arsip kepegawaian PT Pos

Indonesia (Regional Area VI) Semarang. Arsip kepegawaian seluruh pegawai PT Pos Indonesia yang tersebar di area Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dikelola oleh divisi sumber daya manusia.

Di PT Pos Indonesia, arsip kepegawaian milik pegawai yang baru bekerja pada PT Pos Indonesia disimpan pada 2 tempat yaitu kantor regional daerah dan kantor di mana pegawai tersebut ditugaskan. Selain fisik arsipnya disimpan pada 2 tempat tersebut, arsip kepegawaian masing-masing pegawai juga disimpan dalam bentuk elektronik pada *database* nasional sehingga setiap pegawai dapat melihat arsip kepegawaian miliknya. Setiap ada pembaruan arsip kepegawaian, pegawai wajib melakukan *input* data terbaru pada *database* PT Pos Indonesia serta mengirimkan salinan arsip pribadinya pada kantor lokal dan kantor regional tempat pegawai tersebut bertugas. Kemudian apabila pegawai tersebut dipindahkan pada kantor yang area nya berbeda, maka fisik arsip kepegawaian miliknya juga akan dikirim ke kantor regional area, tempat pegawai tersebut dipindahkan.